

Wawasan
Halaman 18
Edisi Rabu, 25 Februari 2015

■ Laporan Keuangan Berbasis Akrua

Pemkot Semarang Satu-satunya

BALAIKOTA - Pemkot Semarang sudah lebih dulu memulai penggunaan sistem akuntansi berbasis akrual sejak tahun 2001 lalu. Hal itu disampaikan Walikota Semarang Hendrar Prihadi kepada *Wawasan* di Balaikota, Senin (23/2).

Menurutnya, dengan penggunaan sistem ini, berarti laporan keuangan Pemkot sudah disajikan layaknya laporan pihak swasta.

"Ini berdasar PP 105 tahun 2000 tentang pengelolaan keuangan daerah sehingga kami melakukan pencarian referensi dan konsultasi dengan akademisi dan pihak-pihak terkait mengenai penyusunan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual," terangnya.

Kemudian lanjutnya di tahun 2002 sampai dengan 2004, dengan mendasarkan pada Peraturan Kemendagri Nomor 29 tahun 2002, Pemerintah Kota Semarang

berhasil membuat laporan keuangan yang terdiri dari LRA (Laporan Realisasi Anggaran), LAK (Laporan Arus Kas), Neraca dan Laporan Surplus Defisit dan Pemerintah Kota Semarang berhasil meraih opini WTP pada LRA tahun 2002.

Pada tahun 2005 sampai dengan 2009, Pemerintah Kota Semarang mulai menerapkan basis akrual walaupun Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasar PP Nomor 24 tahun 2005 menggunakan *Cash Toward Accrual (CTA)*.

Dalam hal ini, di samping laporan keuangan pokok yang terdiri dari LRA, neraca, LAK dan CALK, Pemkot Semarang me-

nambahkan Laporan Operasional (LO) sebagai Laporan Kinerja Keuangan. Di tahun 2009, neraca Kota Semarang yang menyajikan ekuitas secara tunggal dipecah menurut SAP PP 24 tahun 2005 menjadi EDL (Ekuitas Dana Lancar), EDC (Ekuitas Dana Cadangan) dan EDI atau Ekuitas Dana Investasi.

"Hingga akhirnya di tahun 2010, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis Akrua dan Kota Semarang menerapkan SAP tersebut dengan menambahkan LPE (Laporan Perubahan Ekuitas) dan Laporan Perubahan SAL (Saldo Anggaran Lebih)," tukasnya.

■ Tujuh Laporan

Dengan kata lain, imbuh Walikota, Pemkot Semarang menghasilkan tujuh laporan keuangan sesuai SAP. Upaya ini berbuah manis dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

dari BPK dan sampai akhir tahun 2014. "Dari 548 Pemerintah Daerah di Indonesia, baru Kota Semarang yang menerapkan SAP berbasis akrual," tandasnya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyebut pihaknya merasa senang dengan diselenggarakannya acara tersebut. "Setidaknya ada dua pesan yaitu mendorong tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* dan *clean government* yang terus menjadi tuntutan masyarakat," ujarnya.

Ia melanjutkan bahwa itu menjadi tugas semua elemen selaku *civil servant*. Untuk itu ia mengapresiasi kepada pemerintah Kota Semarang yang telah melaksanakannya selama empat tahun. "Harapannya perubahan yang baik ini dapat diikuti oleh pemerintah kota dan kabupaten yang lain sehingga *clean government* dan *good governance* akan segera terwujud," ujarnya. ■ *Hid-Yn*